

BAB IV

KONTEKSTUALISASI POLITIK IDENTITAS

MENURUT BUYA HAMKA

A. Buya Hamka dan Tafsir Al Azhar dalam Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah fenomena di mana kelompok-kelompok sosial yang memiliki kesamaan identitas tertentu, seperti agama, etnis, gender, atau daerah, menggunakan identitas tersebut sebagai basis untuk mengartikulasikan kepentingan politik mereka. Ini bukan sekadar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu kemudian digerakkan menjadi kekuatan politik untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, baik itu dalam bentuk kebijakan, representasi, atau bahkan kekuasaan.¹ Secara teoretis, politik identitas seringkali dipahami sebagai respons terhadap marginalisasi atau ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka merasa bahwa identitas mereka tidak terwakili atau bahkan direpresi dalam sistem politik yang ada, sehingga mendorong mereka untuk bersatu dan memperjuangkan hak-haknya berdasarkan identitas kolektif tersebut. Ruang lingkup politik identitas sangat

¹ G. A. Zhalifunnas, *Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar: Studi Hermeneutika Schleiermacher terhadap Penafsiran Buya Hamka*, Tugas Akhir S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024, p. 12.

luas, mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari kebijakan publik, perebutan jabatan politik, hingga konflik sosial.²

Di Indonesia, politik identitas memiliki relevansi yang sangat kuat dan seringkali mengambil bentuk yang khas. Berbeda dengan negara-negara Barat yang mungkin lebih fokus pada identitas gender atau ras, di Indonesia, dimensi identitas agama dan etnis seringkali menjadi penentu utama dalam arena politik. Selain itu, identitas sosial seperti kesamaan daerah asal atau keturunan juga tidak jarang dimanfaatkan. Hal ini tidak lepas dari keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan ratusan suku bangsa dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Dalam konteks Indonesia, politik identitas seringkali bersinggungan erat dengan narasi keagamaan. Agama bukan hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga bisa menjadi sumber legitimasi politik, perekat solidaritas, bahkan alat mobilisasi massa. Isu-isu keagamaan kerap muncul dalam kampanye politik, pembahasan kebijakan, hingga demonstrasi.

Fenomena ini, menurut Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dapat dipahami dari beberapa perspektif. Buya Hamka selalu menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan umat. Namun,

² Zhalifunnas, *Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar...*, p. 35.

beliau juga memahami bahwa identitas, termasuk identitas keagamaan, adalah bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Tafsir Al-Azhar seringkali mengingatkan umat Islam untuk menjaga akidah dan syariatnya, tetapi pada saat yang sama juga menyerukan toleransi dan menghargai perbedaan. Ketika identitas keagamaan dijadikan alat politik, seringkali terjadi penyempitan makna agama yang seharusnya universal dan rahmat bagi seluruh alam, menjadi sekadar alat untuk mencapai kepentingan duniawi.³

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk bersatu dan tidak bercerai berai, namun juga mengakui adanya keberagaman sebagai kehendak Tuhan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

³ P. Q. A'yun, "Islam dan Multikulturalisme Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al- Azhar," *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 2023, p. 78.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk saling membanggakan atau bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan memahami. Namun, dalam praktik politik identitas, perbedaan ini seringkali justru digunakan untuk memicu perpecahan, bukan persatuan. Ayat lain yang relevan adalah mengenai larangan perpecahan, terdapat dalam Surah Ali 'Imran ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, padahal (sebelumnya) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai perintah mutlak untuk bersatu dalam agama Allah dan menjauhi perpecahan. Politik identitas yang ekstrem justru bisa memecah belah umat dan masyarakat berdasarkan garis identitas yang sempit, mengabaikan persaudaraan yang lebih luas. Ketika politik identitas terlalu menonjolkan satu identitas di atas identitas lainnya, atau bahkan

menggunakannya untuk menyingkirkan kelompok lain, ini bisa mengarah pada konflik dan ketidakstabilan.⁴ Apalagi jika narasi keagamaan disalahgunakan untuk menghakimi atau mengkafirkan pihak lain, seperti yang diperingatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (dengan cermat) dan janganlah kamu katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin', (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah banyak harta yang baik. Begitulah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah (dengan cermat). Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini, dalam Tafsir Al-Azhar, dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak mudah menghakimi keimanan seseorang hanya berdasarkan dugaan atau kepentingan duniawi. Dalam politik

⁴ Muhammad Abdul Salam, "Relasi Agama dan Negara: Studi Kasus Pemikiran Politik Buya Hamka," *Mitsaqan Ghalizan*, 1(2), 2023, p. 65.

identitas, seringkali label keagamaan digunakan untuk membedakan dan bahkan mengucilkan lawan politik, padahal inti dari ajaran agama adalah persatuan dan keadilan. Terakhir, pentingnya menjaga keadilan dan tidak berlaku zalim meskipun terhadap kelompok yang tidak disukai, seperti yang diungkapkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini, menurut Buya Hamka, menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika itu terhadap kelompok yang kita tidak sukai. Politik identitas yang sehat harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak membiarkan bias identitas mengalahkan akal sehat dan prinsip-prinsip universal. Jadi, meskipun identitas adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan politik, bagaimana identitas

itu dikelola dan diartikulasikan akan menentukan apakah ia menjadi kekuatan pemersatu atau justru pemecah belah. Di Indonesia, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan politik identitas dapat berjalan seiring dengan semangat kebhinekaan dan toleransi yang telah menjadi pilar bangsa.

B. Politik Identitas di Era Reformasi

Pemikiran politik identitas menurut Buya Hamka adalah salah satu warisan intelektual yang sangat kaya dan relevan dalam konteks keindonesiaan, terutama dalam diskursus hubungan antara agama dan negara. Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan politikus, tidak pernah secara eksplisit menulis satu buku khusus tentang teori politik. Namun, gagasan-gagasan politiknya tersebar luas dalam berbagai karyanya, mulai dari Tafsir Al-Azhar, novel-novel, hingga tulisan-tulisan di majalah. Inti dari pemikiran politik Hamka adalah keyakinannya yang kuat terhadap konsep integralistik, di mana agama, khususnya Islam, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Hamka, Islam adalah *addien*, sebuah sistem hidup yang lengkap, yang mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*) serta dengan alam.

Oleh karena itu, memisahkan agama dari politik atau urusan negara adalah sebuah kekeliruan besar.

Hamka memandang bahwa negara adalah wadah untuk merealisasikan nilai-nilai ilahiah dan kemaslahatan umat. Negara bukan sekadar entitas sekuler yang mengatur urusan duniawi semata, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai moral dan etika agama. Dalam pandangannya, kepemimpinan Islam bukan hanya tentang seseorang yang beragama Islam memegang jabatan, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang diajarkan Islam diimplementasikan dalam setiap aspek pemerintahan. Pemimpin yang ideal menurut Hamka adalah mereka yang memiliki integritas moral, berilmu, dan mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang identitasnya. Ini sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pada tanggung jawab dan pelayanan, bukan kekuasaan semata.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka seringkali mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan sosial, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Beliau menafsirkan banyak ayat yang menyerukan keadilan, musyawarah, dan amanah sebagai prinsip-prinsip

fundamental dalam bernegara. Misalnya, ketika membahas tentang pentingnya musyawarah, Hamka selalu menekankan bahwa keputusan politik haruslah melalui proses dialog dan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan kehendak satu pihak saja. Ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai landasan penting bagi seorang pemimpin untuk bersikap lemah lembut, pemaaf, dan senantiasa melibatkan rakyatnya dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Prinsip musyawarah ini menjadi kunci dalam membangun konsensus dan menghindari tirani, yang sangat

relevan dalam konteks politik di Indonesia yang majemuk. Kemudian, Hamka juga sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan. Bagi beliau, keadilan adalah pilar utama dalam membangun masyarakat dan negara yang sejahtera. Tanpa keadilan, kekuasaan akan menjadi zalim dan tidak akan membawa kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan keadilan, bahkan terhadap musuh sekalipun Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan penekanan kuat pada kewajiban umat Islam untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal, bahkan jika menghadapi kelompok yang tidak disukai. Keadilan harus menjadi prinsip dasar yang tidak boleh dikompromikan oleh sentimen pribadi atau kelompok, termasuk dalam urusan politik. Ini

adalah fondasi etika bernegara yang baik.⁵ Selain keadilan dan musyawarah, amanah juga merupakan nilai yang termasuk dalam pandangan politik Hamka. Kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang mengkhianati amanah kekuasaan akan mendapatkan sanksi di dunia dan akhirat. Penekanan pada amanah ini terangkum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa amanah di sini mencakup segala bentuk kepercayaan, termasuk kekuasaan dan jabatan. Seorang pemimpin wajib menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Ini merupakan inti dari konsep

⁵ A. N. Hasibuan, H. Paralihan & W. Sari, "Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2024, p. 20.

integralistik Hamka, di mana politik dan pemerintahan harus berlandaskan pada moralitas dan etika agama.

Peran umat Islam dalam berpolitik, menurut Hamka, adalah menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar). Ini bukan berarti umat Islam harus mendirikan negara Islam dalam arti formalistik, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat mewarnai dan membentuk etika berpolitik di Indonesia. Hamka adalah seorang nasionalis yang religius. Beliau sangat mencintai Indonesia dan Pancasila, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Baginya, Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jembatan yang memungkinkan nilai-nilai agama hidup dan berkembang dalam bingkai negara kebangsaan. Ini sejalan dengan perintah untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran dan kesabaran yang terdapat dalam Surah Al-'Asr ayat 1-3, yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: "Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah ringkasan dari seluruh ajaran Islam yang harus menjadi pegangan bagi setiap individu, termasuk dalam kehidupan bernegara. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah masyarakat dan bangsa, dan ini adalah tugas kolektif bagi setiap warga negara, termasuk para politisi. Dalam politik identitas, pemikiran Hamka menjadi sangat krusial. Meskipun beliau adalah seorang ulama besar yang sangat menonjolkan identitas keislamannya, beliau tidak pernah menganjurkan politik identitas yang eksklusif atau memecah belah.⁶ Sebaliknya, beliau selalu menyerukan persatuan umat dan bangsa, serta toleransi antarumat beragama. Bagi Hamka, identitas keislaman harus menjadi sumber kekuatan moral untuk membangun bangsa, bukan untuk memecah belah atau menyingkirkan kelompok lain. Beliau memahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, dan persatuan hanya bisa terwujud jika setiap identitas dapat hidup berdampingan secara harmonis.

⁶ Ahmad Nasir Hasibuan, Hotmatua Paraliha & Winda Sari, "Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2024, p. 20.

Oleh karena itu, meskipun Buya Hamka adalah tokoh yang sangat religius, pemikiran politiknya justru menawarkan kerangka yang inklusif. Konsep integralistiknya bukan berarti negara harus menjadi teokrasi, melainkan bahwa nilai-nilai keagamaan harus menjadi fondasi moral bagi penyelenggaraan negara. Dalam pandangan Hamka, politik adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, demi kemaslahatan umat dan bangsa, serta berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan musyawarah. Ini adalah pemikiran yang sangat relevan untuk memahami dan menyikapi praktik politik identitas di Indonesia, agar tidak terjebak pada polarisasi sempit, melainkan mampu mengarahkan energi identitas untuk kemajuan bersama.

C. Ayat Ayat Politik Identitas

Berdasarkan pemikiran Buya Hamka tentang politik identitas dan relasi agama-negara, penting untuk memahami bagaimana penafsiran beliau terhadap nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam politik identitas Indonesia masa kini. Buya Hamka menegaskan bahwa

Dalam pandangan Buya Hamka, yang tergambar jelas dalam Tafsir Al-Azhar, Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan

dan menghindari perpecahan. Beliau selalu menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah tauhid (keesaan Tuhan) yang semestinya melahirkan persatuan di antara umat, bukan sebaliknya. Ketika politik identitas disalahgunakan untuk menciptakan friksi, kebencian, atau diskriminasi berdasarkan agama atau suku, itu berarti telah menyimpang dari esensi ajaran Islam. Buya Hamka adalah seorang pejuang kemerdekaan yang melihat bagaimana kemajemukan Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang harus dipelihara, bukan dipertentangkan. Oleh karena itu, bagi Hamka, identitas keagamaan harus menjadi modal untuk memperkuat ikatan kebangsaan, bukan melemahkannya. Salah satu ayat yang sering menjadi landasan pemikiran Buya Hamka terkait persatuan adalah Surah Ali 'Imran ayat 103, yang berbunyi:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, padahal (sebelumnya) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."

Dalam penafsirannya, Buya Hamka menegaskan bahwa perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah adalah seruan untuk bersatu dalam nilai-nilai kebenaran Ilahi dan menghindari perpecahan. Ayat ini secara langsung menyoroti bahaya perpecahan yang seringkali dipicu oleh fanatisme sempit, termasuk dalam politik identitas. Masa depan bangsa, menurut Hamka, sangat bergantung pada kemampuan setiap elemen masyarakat untuk mengimplementasikan spirit persatuan ini.

Selanjutnya, Buya Hamka juga menyadari bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan bahkan merupakan tanda kebesaran Tuhan. Politik identitas yang sehat harus mampu merangkul keberagaman ini sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Al-Qur'an secara eksplisit mengakui adanya perbedaan bangsa dan suku sebagai tujuan untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian

Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Buya Hamka menafsirkan bahwa perbedaan identitas ini bukanlah ajang untuk superioritas atau inferioritas, melainkan sarana untuk li ta'arafū (saling mengenal). Politik identitas yang konstruktif adalah yang mendorong dialog, pemahaman, dan kolaborasi antaridentitas demi mencapai kemaslahatan bersama. Masa depan bangsa yang kuat adalah yang mampu menyatukan berbagai identitas dalam bingkai persatuan, bukan mempertentangkan satu sama lain. Refleksi Buya Hamka tentang politik identitas juga melibatkan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap tindakan politik. Bagi beliau, tujuan politik bukan sekadar meraih kekuasaan, melainkan mewujudkan kebaikan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Jika politik identitas hanya menjadi kendaraan untuk kepentingan sesaat atau untuk menguasai kelompok lain, maka ia telah kehilangan esensinya dan akan merusak tatanan bangsa.⁷

⁷Muhammad Ridwan & Deddy Ilyas, "Nasionalisme Hamka: Studi Analisis Tafsir Al- Azhar Karya Hamka tentang Cinta Tanah Air dan Bela Negara," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al - Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 2022, p. 62.

Hamka selalu menekankan bahwa amanah kepemimpinan dan setiap janji politik harus ditepati. Ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam untuk menepati janji dan kontrak dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*

Meskipun ayat ini secara harfiah berbicara tentang kontrak atau perjanjian, dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka sering meluaskan makna "janji-janji" ini mencakup segala bentuk komitmen dan amanah, termasuk janji-janji politik kepada rakyat. Masa depan bangsa yang stabil dan berkeadilan hanya dapat terwujud jika para aktor politik, apapun identitasnya, senantiasa memegang teguh amanah dan janji-janji mereka kepada rakyat. Ini adalah inti dari kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pandangan Hamka.

Dengan demikian, refleksi politik identitas menurut Buya Hamka membawa pada kesimpulan bahwa Islam bukanlah pemicu

perpecahan identitas, melainkan pendorong persatuan, pengakuan atas keberagaman, dan penekanan pada moralitas politik. Masa depan bangsa Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur keagamaan ini dalam praktik politik, sehingga politik identitas tidak menjadi ancaman, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan bersatu.

Untuk mewujudkan politik identitas yang berorientasi pada persatuan dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan Buya Hamka, keimanan dan ketakwaan menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas politik seorang Muslim.

Keimanan dan ketakwaan merupakan kunci utama dalam pembentukan identitas politik seorang Muslim. Dalam Islam, setiap aspek kehidupan, termasuk politik, harus dilandasi oleh nilai-nilai keimanan kepada Allah dan ketakwaan dalam menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Prinsip ini menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai sumber moralitas dan etika dalam setiap keputusan politik, sehingga tercipta pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan seorang

Muslim, termasuk dalam aspek politik. Dalam surah Al-Ma'idah (5):

2, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah di jalan-Nya, agar kamu beruntung."*⁸

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini menekankan tiga hal utama: (a) ketakwaan sebagai dasar dari segala tindakan, termasuk dalam politik, (b) pentingnya usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh, dan (c) perjuangan dalam menegakkan kebenaran sebagai bentuk nyata dari ketakwaan.⁹ Ketakwaan bukan hanya berarti melaksanakan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan, menghindari kezaliman, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁰

⁸ Al-Quran, Surah Al-Ma'idah (5): 2.

⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, p. 125.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, p. 127.

Selain itu, Buya Hamka juga menekankan pentingnya keimanan sebagai dasar moral dalam kehidupan politik. Menurutnya, seorang pemimpin yang beriman akan selalu merujuk kepada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengambil keputusan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.¹¹ Dalam tafsirnya, Buya Hamka sering mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.¹² Oleh karena itu, seorang pemimpin yang bertakwa harus senantiasa berusaha menjaga niatnya agar selalu berada di jalan kebenaran dan keadilan.

Sejalan dengan Buya Hamka, Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin* juga menekankan pentingnya ketakwaan dalam kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa seorang pemimpin yang tidak bertakwa akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dan berbuat zalim kepada rakyatnya, karena ia tidak memiliki landasan moral yang kuat untuk mengendalikan dirinya.¹³ Ketakwaan, menurut Al-Ghazali, adalah benteng yang menjaga hati seorang

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, p. 129.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, p. 130.

¹³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, p. 89.

pemimpin dari godaan kekuasaan yang sering kali dapat membutakan nurani manusia.¹⁴

Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* juga menyatakan bahwa kekuasaan tanpa dasar ketakwaan akan kehilangan legitimasi moral dan cenderung menimbulkan penindasan serta ketidakadilan.¹⁵ Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu berusaha menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, karena menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.¹⁶ Dalam pandangan Ibn Taimiyah, ketakwaan bukan hanya soal ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana seseorang memperlakukan rakyatnya dan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan.¹⁷

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* juga menggarisbawahi pentingnya ketakwaan dalam kepemimpinan politik. Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia akan senantiasa memelihara amanah

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin...*, p. 91.

¹⁵ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, p. 55.

¹⁶ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah...*, p. 56.

¹⁷ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah...*, p. 60.

dan bertindak adil, karena sadar bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.¹⁸ Al-Mawardi juga mengingatkan bahwa ketakwaan akan mendorong seorang pemimpin untuk selalu bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaannya.¹⁹

Dalam politik identitas, prinsip keimanan dan ketakwaan ini sangat penting untuk menjaga agar perjuangan politik tidak terjebak pada sekadar pencarian kekuasaan, tetapi benar-benar berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dan ketundukan kepada Allah. Ketakwaan mengarahkan pemimpin untuk selalu mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok atau golongan tertentu.²⁰

Kemudian, persatuan merupakan prinsip dalam Islam yang berfungsi sebagai perekat utama umat dalam membentuk identitas politik yang kuat. Al-Qur'an menekankan pentingnya persatuan umat dalam banyak ayat, yang menggambarkan bagaimana hubungan antara individu Muslim seharusnya terjalin. Persatuan ini bukan hanya sebatas hubungan sosial, tetapi juga merupakan ikatan

¹⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, p. 72.

¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, p. 74.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, p. 76.

spiritual yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pertama, Al-Qur'an mengingatkan pentingnya menjaga persatuan melalui firman-Nya dalam Surah Al-Hujurat (49): 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*²¹

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip dasar tentang persaudaraan dalam Islam yang melampaui batas etnis, suku, dan bangsa. Buya Hamka menekankan bahwa persaudaraan ini tidak hanya terbatas pada hubungan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi, di mana setiap Muslim saling bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keutuhan umat.²² Tafsir ini terdapat dalam Juz 26, yang menggambarkan bagaimana Islam mengajarkan untuk selalu memperbaiki hubungan yang retak di antara sesama Muslim sebagai bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah.²³ Selain itu, dalam Surah Al-Imran (3): 103, Allah berfirman:

²¹ Al-Quran, Surah Al-Hujurat (49): 10.

²² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 26, p. 360.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., Juz 26, p. 362.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

*Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.”*²⁴

Menurut Buya Hamka, ayat ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada tali Allah sebagai sumber persatuan. Tali Allah di sini dipahami sebagai ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan utama persatuan umat. Buya Hamka menambahkan bahwa sebelum datangnya Islam, suku-suku di Jazirah Arab hidup dalam kondisi permusuhan yang terus-menerus, namun dengan Islam, mereka berhasil disatukan dalam ikatan persaudaraan yang kokoh.²⁵ Tafsir ini terdapat dalam Juz 4, di mana Buya Hamka menggambarkan bagaimana persatuan dalam Islam mampu menghapuskan permusuhan yang berakar pada perbedaan etnis dan suku.²⁶ Kemudian, dalam Surah Al-Anfal Ayat 46, Allah berfirman:

²⁴ Al-Quran, Surah Al-Imran (3): 103.

²⁵ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 4, p. 215.

²⁶ Hamka, Tafsir Al-Azhar..., Juz 4, p. 220..

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Artinya “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*²⁷

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan kepada umat Islam agar tidak terpecah belah, karena perpecahan akan menghilangkan kekuatan dan membuat mereka rentan terhadap ancaman dari musuh.²⁸ Tafsir ini terdapat dalam Juz 9, di mana Buya Hamka menggambarkan pentingnya disiplin dan kesabaran dalam menjaga persatuan, terutama saat menghadapi tantangan politik dan sosial.²⁹ Persatuan ini juga ditegaskan dalam Surah Ash-Shaff (61): 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”*³⁰

²⁷ Al-Quran, Surah Al-Anfal (8): 46.

²⁸ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 9, p. 178.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Juz 9, p. 180.

³⁰ Al-Quran, Surah Ash-Shaff (61): 4.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini sebagai gambaran betapa pentingnya kesatuan dalam barisan perjuangan, baik secara fisik maupun spiritual. Ia menekankan bahwa persatuan dalam Islam bukan hanya soal solidaritas sosial, tetapi juga menyangkut ketertiban dan disiplin dalam memperjuangkan kebenaran.³¹ Tafsir ini terdapat dalam Juz 28, di mana Hamka menjelaskan bahwa umat yang bersatu akan memiliki kekuatan yang tidak mudah dikalahkan.³²

Selain penjelasan dari Al-Qur'an, para ulama klasik seperti Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* juga menekankan pentingnya persatuan dalam umat Islam. Ia berpendapat bahwa tanpa persatuan, umat akan mudah dikalahkan dan ditindas oleh musuhnya.³³ Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menambahkan bahwa persatuan umat adalah syarat utama untuk mencapai kejayaan politik dan kekuatan militer, serta untuk mempertahankan identitas agama dari pengaruh eksternal.³⁴ Moral dan akhlak mulia adalah fondasi utama dalam Islam yang harus menjadi dasar setiap tindakan manusia, termasuk dalam politik identitas. Dalam Islam, seorang

³¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 28, p. 320.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Juz 28, p. 325.

³³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, p. 105.

³⁴ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, p. 66.

pemimpin tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis dan strategisnya, tetapi juga dari akhlaknya. Tanpa akhlak yang baik, seorang pemimpin akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya, bahkan jika ia memiliki kekuasaan yang besar.

Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip penting yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam politik identitas. Keadilan dalam konteks ini mencakup kesetaraan hak, perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial, serta penghindaran dari diskriminasi dan eksklusivisme. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkeadilan sosial.

Al-Qur'an dengan jelas menekankan pentingnya menegakkan keadilan sebagai dasar utama dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah An-Nisa (4): 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika ia

*kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁵

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika itu berarti bersaksi melawan diri sendiri atau keluarga terdekat.³⁶ Tafsir ini terdapat dalam Juz 5, di mana Buya Hamka menggambarkan bahwa dalam memperjuangkan identitas kelompok, umat Islam harus tetap mengutamakan keadilan dan tidak boleh terjebak dalam fanatisme yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok lain.³⁷

Ayat ini menekankan pentingnya bersikap adil, tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga dalam hubungan sosial yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip politik Islam yang menekankan kesejahteraan bersama dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau kelas sosial.

³⁵ Al-Quran, Surah An-Nisa (4): 135.

³⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, p. 320.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Juz 5, p. 322.

Selain menuntut keadilan, Islam juga melarang segala bentuk diskriminasi dan eksklusivisme yang dapat merusak persatuan umat.

Dalam Surah Al-Hujurat (49): 13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*³⁸

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini sebagai panggilan untuk menghindari diskriminasi berdasarkan asal-usul etnis atau kelompok sosial. Ia menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain.³⁹ Tafsir ini terdapat dalam Juz 26, di mana Hamka menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dalam hubungan sosial dan politik, serta menghindari sikap eksklusif

³⁸ Al-Quran, Surah Al-Hujurat (49): 13

³⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 26, p. 380.

yang dapat memecah belah umat.⁴⁰ Lebih lanjut, Surah Al-Ma'idah (5): 8 juga menegaskan pentingnya berlaku adil, bahkan terhadap musuh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا عَدِلُواهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁴¹

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk tetap berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang mungkin dianggap sebagai musuh. Ia menekankan bahwa sikap adil adalah tanda ketakwaan dan kematangan moral yang sejati.⁴² Tafsir ini terdapat dalam Juz 6, di mana Hamka menunjukkan pentingnya menahan diri dari sikap diskriminatif yang dapat merusak persatuan umat.⁴³

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., Juz 26, p. 382.

⁴¹ Al-Quran, Surah Al-Ma'idah (5): 8.

⁴² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6, p. 410.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., Juz 6, p. 412.

Prinsip keadilan dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga fondasi sosial yang memastikan setiap kelompok memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini mendorong umat untuk memperjuangkan identitas mereka dengan cara yang adil, inklusif, dan berlandaskan kemanusiaan. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan sosial.

Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan, moderasi, dan toleransi dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Prinsip moderasi (*wasatiyyah*) mendorong umat untuk berada di tengah, tidak berlebihan dalam keyakinan atau tindakan, serta menghindari ekstremisme yang dapat merusak persatuan masyarakat. Moderasi ini penting dalam politik identitas, di mana seringkali terjadi polarisasi yang tajam antara kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda.

Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk ekstremisme dan mengajarkan sikap moderat dalam kehidupan beragama. Salah satu ayat yang menekankan moderasi adalah Surah Al-Baqarah (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."*⁴⁴

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan bahwa umat Islam adalah umat yang berada di tengah, yang tidak terjebak dalam ekstremisme maupun liberalisme berlebihan.⁴⁵ Tafsir ini terdapat dalam Juz 2, di mana Hamka menekankan bahwa umat Islam harus menjadi contoh bagi umat lain dalam hal keseimbangan dan moderasi, termasuk dalam konteks politik identitas.⁴⁶

Ekstremisme sering kali muncul ketika identitas kelompok dijadikan dasar untuk memecah belah masyarakat. Ini bisa terjadi ketika satu kelompok merasa lebih superior atau lebih berhak atas kekuasaan dibandingkan kelompok lain. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap adil dan menghindari fanatisme

⁴⁴ Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2): 143.

⁴⁵ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 2, p. 220.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Juz 2, p. 222.

yang berlebihan. Dalam Surah Al-Ma'idah (5): 77, Allah memperingatkan tentang bahaya berlebihan dalam agama:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: "Katakanlah, 'Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah sesat sebelumnya, dan mereka telah menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.'"⁴⁷

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai peringatan terhadap sikap berlebihan yang dapat merusak nilai-nilai agama dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.⁴⁸ Tafsir ini terdapat dalam Juz 6, di mana Hamka menekankan pentingnya bersikap moderat untuk mencegah konflik dan memperkuat persatuan umat.⁴⁹ Selain moderasi, toleransi juga merupakan prinsip penting dalam Islam yang berfungsi untuk memperkuat persatuan bangsa. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua kelompok, meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan pandangan politik. Ini tercermin dalam Surah Al-Hujurat (49): 13:

⁴⁷ Al-Quran, Surah Al-Ma'idah (5): 77.

⁴⁸ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 6, p. 410.

⁴⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar..., Juz 6, p. 412.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."⁵⁰

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai ajakan untuk saling mengenal dan menghormati perbedaan, bukan untuk saling merendahkan atau memusuhi.⁵¹ Tafsir ini terdapat dalam Juz 26, di mana Hamka menekankan bahwa perbedaan dalam masyarakat adalah bagian dari sunnatullah yang harus dihormati, bukan dijadikan alasan untuk konflik atau perpecahan.⁵² Moderasi juga menjadi pilar penting dalam membangun keharmonisan sosial. Dalam Surah Al-An'am (6): 108, Allah berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan

⁵⁰ Al-Quran, Surah Al-Hujurat (49): 13.

⁵¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 26, p. 380.

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., Juz 26, p. 382.

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."⁵³

Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk menjaga kehormatan antar kelompok meskipun berbeda keyakinan. Ini adalah prinsip penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik.⁵⁴ Tafsir ini terdapat dalam Juz 7, di mana Hamka menekankan pentingnya moderasi dalam menghadapi perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan toleran.⁵⁵ Dengan demikian, moderasi dan toleransi bukan hanya nilai moral, tetapi juga strategi sosial untuk mencegah konflik dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan menghindari ekstremisme dan memperkuat sikap toleran, masyarakat akan mampu hidup berdampingan secara damai, meskipun memiliki perbedaan identitas dan pandangan politik.

⁵³ Al-Quran, Surah Al-An'am (6): 108.

⁵⁴ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 7, p. 500.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Juz 7, p. 502.

D. Analisis Tafsir Kontekstual

Analisis terhadap politik identitas dalam perspektif Buya Hamka menunjukkan bahwa identitas agama, etnis, atau budaya tidaklah salah selama dijalankan dengan prinsip persaudaraan dan keadilan. Politik identitas justru bisa menjadi kekuatan positif apabila diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan membangun kesadaran kolektif dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Namun, Buya Hamka juga mengingatkan bahwa politik identitas sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pragmatis, misalnya meraih kekuasaan dengan cara memecah belah masyarakat. Pandangan ini masih relevan dalam konteks politik Indonesia pascareformasi, ketika polarisasi berbasis agama dan etnis kerap dimobilisasi untuk memenangkan kompetisi politik.

Jika dikaitkan dengan tafsirnya terhadap Surah Ali Imran ayat 103, Buya Hamka menekankan bahwa persatuan umat adalah perintah agama yang bersifat fundamental. Politik identitas yang menekankan eksklusivitas kelompok dan menumbuhkan permusuhan bertentangan dengan pesan Al-Qur'an untuk berpegang pada tali Allah secara kolektif. Dari sini terlihat bahwa politik

identitas dapat bersifat paradoksal: di satu sisi mampu menjadi perekat sosial, namun di sisi lain bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak diarahkan pada tujuan yang benar. Dalam tafsir Hamka, politik identitas seharusnya diarahkan untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan yang inklusif, sebagaimana semangat Islam rahmatan lil ‘alamin.

Selain itu, dalam konteks keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Buya Hamka menegaskan bahwa perbedaan identitas manusia adalah sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Identitas menjadi sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Dengan demikian, politik identitas yang mengarah pada diskriminasi atau penindasan jelas tidak sesuai dengan prinsip Qur’ani. Dalam realitas kontemporer, hal ini mengandung pesan penting bahwa politik identitas harus digunakan sebagai alat untuk membangun harmoni dalam masyarakat majemuk, bukan sebagai justifikasi atas eksklusivisme dan superioritas kelompok tertentu.

Jika ditinjau lebih dalam, pemikiran Buya Hamka juga memperlihatkan pendekatan moderat dalam memahami politik identitas. Ia tidak menolak eksistensi identitas, melainkan

mengarahkan agar identitas itu menjadi jalan untuk memperkuat moralitas politik. Baginya, politik identitas menjadi bermasalah ketika kehilangan dimensi etik dan spiritual, sehingga berubah menjadi alat untuk mengeksploitasi massa. Pandangan ini memiliki implikasi besar dalam demokrasi Indonesia modern yang rawan terjebak pada politik populisme berbasis identitas. Analisis ini menunjukkan bahwa tafsir Buya Hamka menawarkan kerangka normatif untuk menilai politik identitas: boleh digunakan, tetapi harus dilandasi persatuan, keadilan, dan penghormatan pada keragaman.

Analisis atas ayat-ayat politik identitas dalam tafsir Buya Hamka mengarah pada kesimpulan bahwa Islam mengajarkan politik identitas yang bersifat konstruktif, bukan destruktif. Identitas keagamaan atau kebangsaan dapat menjadi modal sosial yang memperkuat nilai ukhuwah, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran moral agar tidak terjerumus pada praktik eksklusivisme.

